BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga sudah melakukan peranannya dengan optimal dan berjalan sesuai standar operasi prosedur dan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 butir 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak.
2. Kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga adalah: kendala internal berupa belum terdapat rumah aman di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat dan kendala eksternal berupa: korban tidak mau melapor karena pelaku masih pihak keluarga, orang tua yang tidak mempercayai pengakuan anaknya, keluarga yang menganggap hal ini sebagai aib, dan takut akan dipungut biaya.

7.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI untuk memfasilitasi bangunan gedung/ kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang terpisah, dilengkapi dengan shelter, ruang pertemuan, ruang konseling serta ruang baca dan lain-lain, sehingga dapat diakses oleh perempuan dan anak dengan nyaman, aman dan kondusif terutama perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang
2. Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) provinsi, Kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat agar dapat meningkatkan aktivitas pada fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat informasi dan pemberdayaan yang selama ini agak terabaikan

3. Untuk korban tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga, harus berani untuk melaporkan atau memberi tahu orang yang dirasa mampu untuk memberikan pertolongan apabila pihak keluarga tidak memihak pada korban.
4. Masyarakat dapat meningkatkan tangkapan informasi mengenai pelayanan yang memberikan perlindungan terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
5. Dalam upaya perencanaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Barat ini masih banyak sekali keterbatasan terkait dari segi aspek sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana yang mendukung agar memberikan pelayanan yang maksimal

Daftar Pustaka

- Fadilah, K. (2020). Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Pulih. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 145–156. <https://doi.org/10.15408/empati.v7i2.11423>
- Fahririn. (2022). *Jurnal Legal Reasoning*. 5(1), 41–53.
- Fardian, A., & Indonesia, C. (2020). *PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DI INDONESIA DALAM Universitas Gadjah Mada Bulaksumur , Caturtunggal , Kec . Depok , Kabupaten Sleman , Yogyakarta 55281 Abstrak A . Pendahuluan Dewasa ini human trafficking adalah s. 3, 40–55.*
- Haryati, Nurfitri Sahidun, S. N. (2022). *Pendekatan Psikologi Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak*. 2, 297–313.
- Larassati, M. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Anak Terhadap Tindak Kekerasan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 305. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i02.p07>
- Lestari, D., Amirulloh, M. R., & Meigawati, D. (2021). Efektivitas Kinerja PP2TP2A Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 162–180.
- Mahka, M. F. R. (2020). Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz al Nafs). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 39–50. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15012>
- Nurhanipah, Khairul Fahmi Lubis, M. N. S. H. (2019). *Kata Kunci: Serikat Perempuan, Perempuan dan Perlindungan Anak, Korban Kekerasan*. 1(2), 11–15.
- Rosiana, A., Sigit, A., Indawati, Y., Surabaya, K., Anak, P., Info, A., History, A., Psikologis, P. M., & Kekerasan, T. P. (2023). *PELAKSANAAN PEMULIHAN MEDIS PSIKOLOGIS ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK , DAN KEPENDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK*. 9–25.
- Sitti Azizah Hanifah Said, Firdaus W. Suhaeb, M. (2023). *ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADU*. 16(1).
- Vivian, Y., & Arsawati, N. N. J. (2020). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Denpasar Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(3), 248–253.
- Zulfiani, D., Indrawati, ., Kondorura, O., & Sahda AF, M. (2019). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 141. <https://doi.org/10.52239/jar.v6i3.1908>